

RANGKUMAN

Survei mengenai Pengawasan Iklim Investasi Putaran VI (2014)

Pendahuluan

Survei ke-6 mengenai Pengawasan Iklim Investasi yang berlangsung antara bulan Agustus - Desember 2014 ditugaskan kepada AIPEG oleh Kantor Wakil Presiden dan BKPM. Kontraktor yang ditunjuk untuk melakukan penugasan ini adalah LPEM FEUI.

Tujuan utama kegiatan ini adalah untuk mensurvei Iklim Investasi di Indonesia dan membandingkan temuan-temuan yang diperoleh dari survei terhadap sektor manufaktur dan jasa pada tahun 2014 dengan temuan-temuan dari survei sebelumnya yang dilakukan oleh LPEM FEUI, terutama Survei ke-5 Pengawasan Iklim Investasi yang dilakukan pada tahun 2010.

Survei tersebut juga mencakup penilaian terhadap kebijakan mengenai iklim investasi yang dikeluarkan oleh Pemerintah Indonesia (GOI) pada bulan Oktober 2013 (Paket Oktober). Dari delapan kebijakan investasi utamayang termasuk ke dalam Paket Oktober, survei ini mengamati implementasi empat dari delapan kebijakan tersebut sesuai dengan yang telah disepakati dengan BKPM. Keempat kebijakan tersebut berhubungan dengan memulai usaha, mendapatkan pasokan listrik, pendaftaran properti dan mengurus izin mendirikan bangunan.

Metodologi

Tiga survei berbeda dilaksanakan terhadap: (i) perusahaan manufaktur; (ii) perusahaan jasa; dan (iii) kantor notaris. Ketiga survei tersebut dilakukan di enam kota besar di Indonesia yaitu, Medan, Jabodetabek, Bandung, Semarang, Surabaya dan Makassar.

- Survei Industri Manufaktur – mencakup 345 perusahaan manufaktur. Sampel survei mencakup perusahaan-perusahaan manufaktur yang mempekerjakan 100 karyawan atau lebih yang diambil dari Statistik Industri Manufaktur Indonesia 2010 (BPS).
- Survei Perusahaan Jasa - mencakup 187 perusahaan jasa. Sampel survei mencakup perusahaan-perusahaan jasa yang mempekerjakan 25 karyawan atau lebih yang diperoleh dari Sensus Ekonomi Indonesia 2006 (BPS).
- Survei Notaris – mencakup 59 kantor notaris. Sampel untuk kantor notaris diambil dari direktori kantor notaris di Kementerian Hukum & HAM. Responden notaris dipilih berdasarkan apakah mereka memiliki pengalaman dalam membantu klien mendirikan perusahaan baru di Indonesia.

Hambatan-hambatan yang ada dalam menjalankan usaha diperoleh dari persepsi perusahaan mengenai iklim usaha. Survei menggunakan 25 indikator yang bertujuan untuk mengukur kondisi umum iklim usaha. Indikator yang digunakan pada tahun 2014 secara umum sama dengan yang digunakan dalam survei tahun 2010. Terdapat beberapa indikator baru yang digunakan dalam survei 2014 tetapi indikator tersebut telah disesuaikan agar selaras dengan survei 2010. Indikator tersebut diukur untuk perusahaan manufaktur dan perusahaan jasa.

Temuan-Temuan Utama

Lima Hambatan Teratas dalam Menjalankan Usaha di tahun 2014 (Manufaktur)

Seperti yang dapat dilihat dalam Gambar 1, lima faktor yang dianggap sebagai hambatan-hambatan utama dalam menjalankan usaha oleh perusahaan-perusahaan manufaktur selama tahun 2014 adalah:

- **Ketidakstabilan makroekonomi**
- **Transportasi**
- **Pasokan listrik**
- **Perizinan dan lisensi dari pemerintah daerah**
- **Kebijakan ekonomi dan ketidakpastian peraturan**

Faktor-faktor tersebut hampir sama dengan faktor-faktor yang didapatkan dalam survei 2010. Pada tahun 2010, lima faktor teratas adalah transportasi, ketidakstabilan makroekonomi, pasokan listrik, biaya keuangan serta keterampilan tenaga kerja dan pendidikan.

Sebagian besar hambatan menjalankan usaha bagi perusahaan manufaktur dinilai bertambah buruk.

Sebagian besar hambatan dalam menjalankan usaha bagi perusahaan-perusahaan manufaktur dianggap bertambah buruk. Dibandingkan dengan survei yang dilaksanakan pada tahun 2010, 21 dari 25 hambatan yang disurvei dianggap bertambah buruk. Lebih banyak perusahaan manufaktur sekarang yang menilai hambatan-hambatan tersebut sama saja, lebih buruk, atau jauh lebih buruk daripada yang mereka rasakan di tahun 2010. Indikator yang paling bertambah buruk (bertambah buruk lebih dari 10 persentase dari jumlah responden) adalah:

- **Lisensi dan izin yang dikeluarkan oleh pemerintah pusat**
- **Kebijakan ekonomi dan ketidakpastian peraturan**
- **Lisensi dan izin dari pemerintah daerah**
- **Peraturan tenaga kerja oleh pemerintah pusat dan daerah**

Empat aspek iklim usaha yang mengalami perbaikan untuk perusahaan manufaktur antara tahun 2010 dan 2014 adalah:

- **Jasa penyediaan air bersih**
- **Jasa penyediaan listrik**
- **Jasa telekomunikasi**
- **Jasa internet**

(Sebagai catatan, untuk jasa telekomunikasi dan internet, persentase perbaikannya sangat kecil).

Gambar 1: Hambatan dalam Menjalankan Usaha bagi Perusahaan Manufaktur: 2010-2014(% dari Responden)



Lima Hambatan Teratas dalam Menjalankan Usaha di tahun 2014 (Sektor Jasa)

Lima faktor yang dianggap sebagai hambatan-hambatan utama dalam menjalankan usaha oleh perusahaan-perusahaan jasa selama tahun 2014 adalah:

- **Listrik**
- **Transportasi**
- **Ketidakstabilan makroekonomi**
- **Biaya keuangan**
- **Perizinan dan lisensi dari pemerintah daerah**

Faktor-faktor tersebut hampir sama dengan faktor-faktor yang ada di dalam survei 2010. Pada tahun 2010, lima faktor teratas adalah transportasi, listrik, ketidakstabilan makroekonomi, biaya keuangan serta kriminalitas, pencurian dan kekacauan.

Hambatan menjalankan usaha yang mengalami perbaikan dan yang semakin buruk

Terdapat sedikit lebih banyak hambatan menjalankan usaha bagi perusahaan-perusahaan jasa yang dianggap menjadi lebih baik dibandingkan dengan yang semakin buruk. Dibandingkan dengan survei pada tahun 2010, ada 13 indikator yang mengalami perbaikan dan 12 indikator yang bertambah buruk. Kelima indikator yang paling bertambah buruk untuk perusahaan jasa adalah:

- **Biaya keuangan**
- **Lisensi dan izin dari pemerintah daerah**
- **Kebijakan dan ketidakpastian ekonomi**
- **Akses keuangan**
- **Lisensi dan izin dari pemerintah pusat**

Aspek iklim usaha yang mengalami perbaikan untuk perusahaan jasa antara tahun 2010 dan 2014 adalah:

- **Pajak dan retribusi daerah**
- **Administrasi pajak**
- **Korupsi di pemerintah pusat**
- **Korupsi di pemerintah daerah**

Temuan terperinci selanjutnya

Indikator	Arah Perubahan sejak 2010	Catatan/Justifikasi
Izin Usaha (waktu pengolahan)	Bervariasi	<ul style="list-style-type: none"> Waktu untuk mendapatkan perizinan utama berkurang dari 15 sampai 33 menjadi 12 sampai 23 hari kerja (tergantung dari izinnya). Waktu untuk mendapatkan perizinan utama bertambah dari sekitar 9 sampai 18 menjadi 10 sampai 25 hari (tergantung dari izinnya).
Legalisasi PT (Perusahaan)	Positif	<ul style="list-style-type: none"> Waktu pengolahan untuk Legalisasi PT berkurang dari 28 hari kerja pada tahun 2010 menjadi 11 hari kerja pada tahun 2014.
Jasa Infrastruktur	Bervariasi	<ul style="list-style-type: none"> Secara umum, waktu yang dibutuhkan untuk memperoleh sambungan/pemasangan utilitas memburuk. Untuk perusahaan jasa, waktu untuk mendapat sambungan bertambah lama untuk pemasangan listrik, saluran telepon, air dan sambungan gas. Untuk perusahaan manufaktur, waktu untuk mendapat sambungan untuk gas bertambah buruk secara signifikan dan sedikit memburuk untuk penyediaan air. Untuk sambungan listrik dan telepon, waktu untuk mendapat sambungan dianggap lebih cepat pada tahun 2014 dibandingkan tahun 2010. Penyediaan jasa utilitas umumnya lebih baik pada tahun 2014 dibanding tahun 2010. Perusahaan manufaktur mengalami lebih sedikit gangguan untuk semua sambungan gas, listrik dan penyediaan air bersih tetapi mengalami lebih banyak gangguan untuk layanan telepon. Perusahaan jasa menghadapi situasi yang lebih beragam terkait frekuensi gangguan layanan dan frekuensi gangguan yang lebih tinggi daripada perusahaan manufaktur untuk semua layanan yang disediakan.
Proses Bea & Cukai	Bervariasi	<ul style="list-style-type: none"> Waktu pengolahan perizinan impor mengalami sedikit perbaikan. Frekuensi pembayaran tidak resmi di pabean mengalami penurunan. Namun, persepsi perusahaan terhadap proses bea & cukai secara keseluruhan (waktu, kompleksitas dan biaya) memburuk.

Indikator	Arah Perubahan sejak 2010	Catatan/Justifikasi
Administrasi Perpajakan	Positif	<ul style="list-style-type: none"> • Waktu untuk pengolahan restitusi pajak menjadi lebih singkat. • Nilai restitusi dana yang lebih tinggi dibanding jumlah yang diminta. • Berkurangnya jumlah perusahaan yang melakukan praktik pembayaran tidak resmi. • Waktu yang dihabiskan untuk administrasi perpajakan menjadi lebih singkat. • Staf yang ditugaskan untuk menangani masalah perpajakan berkurang.
Peraturan dan Isu Ketenagakerjaan	Negatif	<ul style="list-style-type: none"> • Peraturan ketenaga kerjaan secara umum telah mejadimasalah yang lebih besar baik bagi perusahaan manufaktur maupun jasa, (walaupun beberapa aspek peraturan ketenagakerjaan bagi perusahaan manufaktur telah membaik) • Peraturan mengenai upah minimum merupakan masalah terbesar sampai saat ini dan semakin memburuk bagi perusahaan jasa manufaktur dan jasa. • Jumlah perusahaan manufaktur dan jasa yang melaporkan masalah keteaga kerjaan di tahun 2014 meningkat jika dibandingkan di tahun 2010. Masalah terbesar yang dihadapi oleh perusahaan manufaktur dan jasa adalah yang terkait dengan tuntutan kenaikan gaji/upah. • (Walaupun keadaannya memburuk, survei menunjukkan bahwa biaya penanganan masalah ketenagakerjaan turun baik bagi perusahaan manufaktur maupun jasa)
Kepastian Peraturan	Positif	<ul style="list-style-type: none"> • Bagi perusahaan jasa, tingkat kepastian peraturan secara umum membaik, terutama di tingkat daerah. Bagi perusahaan manufaktur tingkat kepastian peraturan tetap sama baik di tingkat pusat maupun daerah.
Hubungan dengan Birokrasi	Positif	<ul style="list-style-type: none"> • Frekuensi pemberian pembayaran tidak resmi yang dilakukan oleh perusahaan manufaktur dan perusahaan jasa kepada birokrasi mengalami penurunan. • Biaya relatif (sebagai bagian dari total biaya) dari pembayaran tidak resmi telah berkurang dari 1,8% menjadi 1,5% untuk perusahaan manufaktur, tetapi sedikit meningkat untuk perusahaan jasa, dari 1%

Indikator	Arah Perubahan sejak 2010	Catatan/Justifikasi
		<p>menjadi 1,1%.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Sementara persepsi responden mengenai total waktu yang dihabiskan untuk menemui pejabat pemerintah bervariasi (umumnya waktu menjadi berkurang untuk perusahaan manufaktur dan bertambah untuk perusahaan jasa), waktu rata-rata dan frekuensi kunjungan pejabat pemerintah kelokasi atau kantor perusahaan manufaktur atau jasaberkurang sejak tahun 2010.

Dampak dari Paket Oktober 2013

Permasalahan	Target	Temuan Survei	Dampak Keseluruhan
	Badan usaha (Perseroan Terbatas/PT) dapat didirikan melalui sistem daring (<i>online</i>)	<ul style="list-style-type: none"> Sistem daring untuk melegalisasi perusahaan Perseroan Terbatas (PT) diresmikan dan dimulai pada bulan April 2014. Sistem baru ini secara signifikan meningkatkan dan memperbaiki proses legalisasi perusahaan dengan memperpendek waktu pengolahan izin yang diperlukan dari 28 hari kerja pada tahun 2010 menjadi 11 hari kerja pada tahun 2014. 	Positif
Memulai Usaha	Penyederhanaan proses penerbitan Surat Izin Usaha Permanen (SIUP) dan Tanda Daftar Perusahaan (TDP)	<ul style="list-style-type: none"> Proses penerbitan SIUP dan TDP kini menjadi semakin cepat. Kini dibutuhkan rata-rata 15 hari untuk memperoleh SIUP, turun dari 20 hari menurut survei di tahun 2010. Begitu pula untuk proses penerbitan TDP yang membutuhkan 15 hari, berkurang dari 20 hari pada tahun 2010. (Meskipun demikian, temuan-temuan ini masih jauh dari target yang ditentukan oleh BKPM yaitu selama 3 (tiga) hari). 	Positif
Memperoleh Pasokan Listrik	Penyederhanaan prosedur dan berkurangnya biaya serta waktu untuk memperoleh sambungan listrik	<ul style="list-style-type: none"> Waktu yang diperlukan untuk mendapatkan sambungan listrik baru telah berkurang menjadi 24 hari pada tahun 2014 dari sebelumnya 35 hari pada tahun 2010 untuk perusahaan manufaktur. Namun untuk perusahaan jasa, waktu yang diperlukan bertambah dari 4 hari menjadi 21 hari. Frekuensi gangguan sambungan listrik PLN telah berkurang dari 3 kali menjadi 6 kali setiap enam bulan untuk perusahaan manufaktur tetapi meningkat dari 4 kali menjadi 6 kali per periode enam bulan untuk perusahaan jasa. 	Bervariasi

Permasalahan	Target	Temuan Survei	Dampak Keseluruhan
		<ul style="list-style-type: none"> Potensi biaya/kerugian dari pemadaman listrik diperkirakan 5,9 persen dari total penjualan tahunan untuk perusahaan-perusahaan manufaktur selama tahun 2014. Jumlah ini sedikit berkurang dari 6 persen selama tahun 2010. 	
Pendaftaran Properti	Pengurangan waktu untuk pemeriksaan sertifikat tanah dan pengalihan hak atas tanah	<ul style="list-style-type: none"> 32 persen responden perusahaan yang disurvei mengetahui mengenai Surat Instruksi Kepala Badan Pertanahan Negara No. 2/Ins/VI/2013 mengenai Percepatan Verifikasi Sertifikat Tanah dan Pelayanan terkait Pengalihan Hak atas Lahan. Sekitar 38 persen responden lainnya memiliki pengalaman langsung dengan peraturan tersebut. Sekitar setengah dari responden perusahaan yang memiliki pengalaman langsung dengan peraturan ini melihatnya sebagai peraturan yang bermanfaat atau sangat bermanfaat. 	Positif
Mengurus Izin Mendirikan Bangunan	Pengajuan Izin Mendirikan Bangunan (IMB) secara daring (<i>online</i>)	<ul style="list-style-type: none"> 13 persen responden perusahaan yang disurvei mengetahui mengenai Keputusan Kepala Kantor Pengendalian Bangunan DKI Jakarta No. 2/2014. 26 persen responden memiliki pengalaman langsung dengan peraturan tersebut. Sekitar 44 persen responden perusahaan yang memiliki pengalaman langsung dengan peraturan tersebut, melihatnya sebagai peraturan yang bermanfaat atau sangat bermanfaat. 	Bervariasi
	Penyediaan layanan air bersih semakin cepat (PDAM)	<ul style="list-style-type: none"> Waktu untuk mendapatkan sambungan baru air bersih dari PDAM meningkat dari 15 hari menjadi 17 hari untuk perusahaan 	Negatif

Permasalahan	Target	Temuan Survei	Dampak Keseluruhan
		<p>manufaktur, dan dari 4 hari menjadi 10 hari untuk perusahaan jasa.</p> <ul style="list-style-type: none"> Namun, frekuensi gangguan air bersih PDAM di perusahaan manufaktur turun dari 4 kali menjadi 2 kali dalam enam bulan dan 5 - 4 kali di perusahaan jasa. 	
	<p>Penyediaan jasa sambungan telepon semakin cepat (Telkom)</p>	<ul style="list-style-type: none"> Waktu untuk mendapatkan sambungan telepon baru dari Telkom berkurang dari 12 hari menjadi 8 hari untuk perusahaan manufaktur, tetapi meningkat dari 5 hari menjadi 8 hari untuk perusahaan jasa. Frekuensi gangguan saluran telepon Telkom di perusahaan manufaktur sedikit meningkat dari 2 kali menjadi 3 kali dalam periode enam bulan tetapi berkurang dari 18 kali menjadi 6 kali di perusahaan jasa. 	<p>Bervariasi</p>